BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah Republik Indonesia disamping sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Sebagai salah satu sumber penerimaan Pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah (*budgeter*), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. (Meutia Fatchanie:2007)

Pelaksanaan pembangunan prasarana pada hakekatnya adalah proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Dengan ini dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan tersebut, Pemerintah Pusat memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah. Sehubungan dengan pajak, Pemerintah Daerah harus mampu menggali sumber pendapatan asli daerah untuk dikembangkan. Otonomi daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan didukung dengan Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat. Dimana otonomi daerah itu sendiri merupakan satuan pemerintahan didaerah yang penduduknya berwenang mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan aspirasinya. Sehingga Pemerintah Daerah berhak mengurus dan mengatur urusannya sendiri berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya. (Pustaka Agung:2003)

Pemerintah Daerah memberlakukan beberapa jenis pungutan di Indonesia yang terdiri dari pajak pusat, pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu pos penerimaan asli daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah adalah pajak daerah. Menurut Djamu Kertabudi (2007:17) Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang nomor 34 tahun 2000. Dasar pertimbangan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini adalah untuk memperkuat upaya peningkatan penerimaan daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan menitikberatkan pada kabupaten.

Beberapa jenis pajak daerah di Indonesia, yaitu pajak daerah tingkat I (propinsi) yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea milik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan pajak daerah tingkat II yang terdiri dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. (Siti Kurnia Rahayu, 2010:46)

Salah satu objek Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung adalah Pajak Parkir yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan yang didasarkan pada Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir. Berbeda dengan Retribusi Parkir yang dikenakan kepada pemakai jika memanfaatkan sebagian dari badan jalan yang merupakan fasilitas milik Negara, Pajak Parkir dikenakan terhadap pemilik perorangan atau badan swasta yang memiliki lahan parkir diluar tanah milik Negara. Dipilihnya Pajak Parkir sebagai objek penelitian karena sebagai salah satu jenis pajak daerah yang dikembangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Pajak Parkir sebagai kontributor dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah meskipun realisasinya tidak sebesar dibandingkan dengan jenis pajak daerah lain seperti pajak kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan, pembangunan dan lain-lain.

Objek Pajak Parkir diharapkan mempunyai potensi yang cukup tinggi guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung yang bertujuan untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan, pembangunan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dimana pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri merupakan sumber keuangan yang cukup potensial menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah yang telah disempurnakan dengan Undang-undang 79 Tahun 1999 yang pendapatannya bersumber dari hasil Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Parkir, hasil Retribusi Daerah, hasil Perusahaan Daerah dan Usaha lain-lain yang sah. Semua pendapatan yang bersumber dari hasil tersebut terutama dalam hal ini adalah Pajak Parkir merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. (Ganda:2010)

Namun pada kenyataannya, objek pajak parkir yang diharapkan mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk menambah pendapatan asli daerah justru tidak mencapai target. Terbukti pada target PAD tahun 2008 sebesar Rp 152.407 miliar terrealisasi Rp 147.631 miliar, atau 96,8% dan target PAD dari hasil pajak daerah, Rp 62.716 miliar, terrealisasi Rp 54.391 miliar. Pajak daerah mencakup tujuh item, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan galian C, dan pajak parkir. (Pikiran Rakyat, 8 April 2008).

Selain itu juga penyebab tidak tercapainya suatu target dikarenakan sistem penerimaan pajak parkir masih dilakukan secara manual yang mengakibatkan kebocoran pajak parkir. (Berita Pajak:2009)

Kemudian hal lain yang jelas dapat merugikan pemerintah daerah yaitu terdapatnya parkir liar di pinggir badan jalan dimana mengakibatkan kemacetan, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perparkiran pun semakin tidak jelas akibat parkir liar ini. Banyak tukang parkir liar yang menikmati hasil parkirannya tersebut. Tak sampai di situ, dampak yang ditimbulkan dengan maraknya parkir liar adalah keamanan. (Pikiran Rakyat, 24 Februari 2010)

Beberapa fenomena secara umum diatas menunjukan bahwa masih banyak sekali potensi pajak parkir yang belum terealisasikan dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah, yang menyebabkan penerimaan pendapatan asli daerah berkurang sehingga pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah menjadi terhambat akibat dari penerimaan yang tidak optimal.

Selanjutnya penulis paparkan mengenai fenomena khusus yaitu terdapatnya target pajak parkir yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan potensi sebenarnya, terdapatnya target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan reakisasi sebenarnya, ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pajak parkir maupaun realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang sudah dilakukan dan belum adanya peraturan daerah yang menetapkan sanksi apabila parkir di pinggir badan jalan dan masih terbatasnya penyedia lahan parkir. (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, 2010)

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung merupakan salah satu bagian dari pemerintahan daerah yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan penagihan pajak daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, disamping tugas-tugas lainnya. Berikut ini data mengenai penerimaan Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) selama tahun anggaran 2005-2009 :

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Parkir pada DPPK Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran 2005-2009

No	Tahun Anggaran	Target Pajak Parkir (Rp)	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	%
1	2005	30.000.000	16.319.900	54,40
2	2006	26.963.000	34.097.900	126,46
3	2007	30.350.000	32.774.500	107,99
4	2008	30.000.000	76.244.400	254,08
5	2009	50.000.000	136.716.942	273,43

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2010

Dari tabel 1.1 diatas, dapat kita ketahui bahwa realisasi pajak parkir dari setiap tahunnya dapat dikatakan mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2007 mengalami sedikit penurunan. Tetapi pada tahun 2008-2009 penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan kembali. Setiap besarnya penerimaan pajak parkir dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung yang menunjukkan bahwa pajak daerah salah satunya pajak parkir mempunyai peranan yang besar terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Adapun data mengenai penerimaan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung selama tahun anggaran 2005-2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada DPPK Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran 2005-2009

No	Tahun Anggaran	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%
1	2005	136.331.928.000,00	108.322.354.701,61	79,45
2	2006	136.408.772.000,00	137.532.499.196,23	100,82
3	2007	152.407.266.000,00	147.630.987.490,05	96,87
4	2008	139.548.784.293,00	144.660.409.277,08	103,66
5	2009	151.496.194.500,00	152.549.655.824,00	100,70

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2010

Dari tabel 1.2 diatas dapat kita ketahui bahwa realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun anggaran 2006, 2008 dan 2009 mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2005 dan tahun anggaran 2007 mengalami sedikit penurunan, ini dikarenakan kesadaran dari wajib pajak sendiri yang masih rendah dalam kewajibannya membayar pendapatan asli daerah pada tahun 2005 dan 2007 tersebut. Pada tahun 2006, 2008, dan 2009 penerimaan pendapatan asli daerah sudah mencapai target. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah dari sumber-sumber pendapatan asli daerah terutama pajak daerah.

Dari kedua perkembangan diatas, pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dapat kita ketahui kontribusi pajak parkir terhadap PAD selama 5 tahun yaitu dari tahun anggaran 2005-2009. Untuk lebih mengetahui sampai seberapa besar kontribusi pajak parkir terhadap PAD, terlihat pada tabel 1.3 :

Tabel 1.3
Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2005-2009

No	Tahun Anggaran	Penerimaan Pajak Parkir (Rp)	Penerimaan PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2005	16.319.900	108.322.354.701,61	1,50
2	2006	34.097.900	137.532.499.196,23	2,47
3	2007	32.774.500	147.630.987.490,05	2,22
4	2008	76.244.400	144.660.409.277,08	5,27
5	2009	136.716.942	152.549.655.824,00	8,96

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2010

Dari tabel 1.3 dapat kita ketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilihat dari persentasi kontribusi dari tahun anggaran 2005 sampai dengan 2009 terus meningkat meskipun pada tahun 2007 mengalami sedikit penurunan dikarenakan jumlah penerimaan pajak daerah sedikit berkurang. Setiap kontribusi pajak parkir dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung yang menunjukkan bahwa pajak daerah salah satunya pajak parkir mempunyai peranan yang cukup besar terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Apabila pendapatan pajak parkir besar, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah besar. Apabila pendapatan pajak parkir kecil, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil.

Dari kenyataan di atas terdapat masalah yaitu penerimaan Pemerintah Daerah melalui Pajak Parkir sebenarnya masih dapat dioptimalkan dengan cara mensosialilsasikan kepada masyarakat solusi-solusi dan pengawasan sebaik-baiknya

tentang ketentuan-ketentuan pajak parkir agar setiap wajib pajak mengerti, memahami serta melaksanakan ketentuan tersebut. Apabila hal tersebut berjalan dengan baik dan benar, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pajak parkir. Dimana setiap daerah harus dapat meninjau seberapa besar potensi daerah yang dapat digali dan dikembangkan yang selanjutnya dapat dilihat berapa target yang dapat dicapai dari potensi tersebut sehingga pada akhirnya seluruh potensi daerah yang ada dapat memberikan kontinuitas yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka penulis merasa perlu untuk meneliti efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Maka penyusunan Tugas Akhir penelitian ini mengambil judul : **"TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR DAN KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN (DPPK) KABUPATEN BANDUNG."**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam pokok pembahasan penelitian ini dilakukan dalam beberapa aspek, yaitu :

1. Terdapatnya target pajak parkir yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan potensi sebenarnya.

2. Terdapatnya target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan realisasi sebenarnya.
3. Terdapatnya ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pajak parkir yang sudah dilakukan.
4. Terdapatnya ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang sudah dilakukan.
5. Belum adanya peraturan daerah yang menetapkan sanksi apabila parkir di pinggir badan jalan.
6. Masih terbatasnya penyedia lahan parkir sehingga tidak meningkatkan penerimaan pajak parkir.

1.2.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah pengidentifikasian persoalan yang diteliti secara jelas, biasanya berisi pertanyaan kritis, sistematis, dan representatif untuk mencari jawaban dari persoalan yang ingin dipecahkan.

Berdasarkan hal tersebut maka perumusan masalah pada penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efekitivitas pajak parkir dan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.

3. Bagaimana hambatan yang terjadi dalam penerimaan pajak parkir dan penerimaan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.
4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung dalam meningkatkan panerimaan pajak parkir dan pendapatan asli daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pajak parkir dan kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dari penelitian yang dilaksanakan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas pajak parkir dan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.

3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir dan penerimaan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung dalam meningkatkan panerimaan pajak parkir dan pendapatan asli daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat riil bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1.4.1 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

   Diharapkan dapat menambah pengetahuan, mendapat wawasan pembanding yang baik mengenai efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah serta dapat mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan pajak parkir itu sendiri.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Diharapkan dapat meningkatkan motivasi guna memiliki pengetahuan yang lebih luas dan dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang kelak

akan membutuhkannya mengenai efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan daerah.

3. Bagi Ilmu Akuntansi

   Diharapkan dapat mengetahui efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan daerah yang saling berhubungan dengan Perpajakan khususnya Pajak Daerah. Mata kuliah yang terkait yaitu Perpajakan dan Akuntansi Sektor Publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu :

1. Instansi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

   Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung mengenai keberadaan sektor pajak parkir yang sangat potensial untuk dipungut.

2. Bagian Pendapatan

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan dan perkembangan pajak parkir juga pendapatan asli daerah, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi bagian pendapatan untuk lebih memperhatikan dan mengawasi para wajib pajak parkir dan evaluasi dari hasil perparkiran dan seluruh kegiatan yang dilakukan juga dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan dimasa yang akan datang khususnya mengenai pajak parkir dan pendapatan asli daerah. Sehingga dapat meningkatkan kualitas

kerja menjadi lebih baik lagi, dan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian dibimbing oleh pembimbing lapangan untuk mengetahui data atau informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir. Adapun lokasi dan waktu penelitian adalah sebagai berikut :

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi tempat penulis melakukan penelitian adalah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung yang beralamat di Jl. Soreang KM. 17 Telp. (022) 5891191-5891192-5891143-5891144 Soreang Kabupaten Bandung 40911.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan 25 Juli 2010.

Tabel 1.4
***Time Schedule* Pelaksanaan**

No	Kegiatan	Maret 2010				April 2010				Mei 2010				Juni 2010				Juli 2010			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Survey :																				
	Persiapan Judul Tugas Akhir	■																			
	Pengajuan Judul Tugas Akhir	■																			
	Mencari Instansi		■																		
2	Pengumpulan Data		■	■	■	■	■														
3	Pengelolaan Data			■	■	■	■	■	■												
4	Proses Penyusunan Data				■	■	■	■	■	■	■										
5	Bimbingan Tugas Akhir :					■	■	■	■	■	■	■	■	■							
	Usulan Penelitian Proposal						■	■													
	Proposal Penelitian							■	■												
	Pengajuan Bab 1 dan Revisi								■	■	■										
	Pengajuan Bab 2 dan Revisi										■	■									
	Pengajuan Bab 3 dan Revisi											■	■	■							
	Pengajuan Bab 4 dan Revisi													■	■	■					
	Pengajuan Bab 5 dan Revisi															■	■				
6	Daftar Sidang																■	■	■		
7	Sidang																		■	■	■